

JURNAL KAJIAN MEDIA

e-ISSN: 2579-9436, URL: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ilkom/index>

Vol 4 No 1

Juni 2020

Halaman 01 – 10

Ruang publik dan media sosial: partisipasi politik mahasiswa Indonesia

Sufri Eka Bhakti¹

¹IAIN Lhokseumawe

Jalan Banda Aceh – Medan, Bhuket Rata, Lhokseumawe, Indonesia

sufri@iainlhokseumawe.ac.id

English Title: Public sphere and social media: Indonesian student' political participation

Received: 12-02-2020; Revised: 23-06-2020;

Acceptance: 24-06-2020; Published: 27-06-2020

Abstrak - Ruang publik belum efektif dan dianggap kurang memiliki manfaat yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Asumsi Habermas dalam teori tindakan komunikatif (*Communicative Action*) adalah menganggap ruang publik memiliki pengaruh secara politis. Media sosial sebagai alternatif ruang publik melalui teori tindakan komunikatif Habermas percaya bahwa mahasiswa bebas berkomunikasi satu dengan lainnya. Sebab itu, perlu adanya kajian untuk mengetahui sejauhmana peran media sosial sebagai ruang publik baru dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa. Dengan menggunakan *mixed method*, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengetahui penggunaan media sosial sebagai ruang publik baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial terbukti efektif sebagai ruang publik bagi mahasiswa dan telah menjadi bagian terpenting bagi interaksi, diskusi dan aspirasi politik mahasiswa dalam sebuah negara yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa media sosial telah memberikan kontribusi yang masif dan signifikan terhadap perkembangan ruang publik yang universal, hingga dapat diakses oleh mahasiswa tanpa batas ruang dan waktu. Sebab itu, mahasiswa hampir tidak menemui begitu banyak hambatan mengakses informasi dan mengekspresikan aspirasi politik mereka. Semakin terbukanya ruang publik bagi mahasiswa melalui media sosial dapat meningkatkan partisipasi politik mahasiswa melalui komunikasi dialogis dan ini merupakan langkah baik bagi terwujudnya demokrasi yang deliberatif di Indonesia.

Kata kunci: Media Sosial; Ruang Publik; Tindakan Komunikatif.

Abstract - *The public sphere has not been effective and is considered lacking a significant benefit to the development of democracy in Indonesia. The assumption of Habermas (1987) in the theory of communicative action is to consider public sphere that have political influence. Social media as a public sphere through communicative action theory Habermas believes that students are free to communicate with each other. Therefore, there is a need*

for studies to study which social media is needed to increase student political participation. By using a mixed method, namely discussing quantitative and qualitative to find out the use of social media as a public space through more contemporary political communication. The results show that social media has proven to be effective as a public sphere for students and has become the most important part for the interaction, discussion and political aspirations of students in a country that supports democracy. This can be clearly seen that social media has contributed massively and significantly to the development of universal public sphere, accessible to students without sphere and time limits. The reason is that students can hardly access information and challenge their political aspirations. The more open public sphere for students through social media can increase student political participation through dialogic dialogue and this is a good step for the realization of deliberative democracy in Indonesia.

Keywords: *Social Media; Public Sphere; Communicative Action*

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai ruang publik dan media sosial merupakan kajian menarik dalam khazanah ilmu komunikasi di Indonesia (Putranto, 2019). Secara umum, perbincangan tentang media sosial sebagai kajian *computer mediated communication (CMC)* kerap menganalisa tentang angka, data dan statistik. Dengan hadirnya *platform* media sosial telah disinyalir menjadi alternatif ruang publik baru di Indonesia dikarenakan media sosial telah menghilangkan batasan antara ruang dan waktu. Sehingga, keberadaan media sosial dianggap dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan partisipasi politik di Indonesia.

Di Indonesia, pengguna media sosial mencapai 56 % dari jumlah populasinya (Chaffey, 2020). Media sosial juga sangat bervariasi berdasarkan tingkat penggunaan di Indonesia dengan berbagai demografi masyarakat. Asumsi kajian ini, pengguna media sosial dengan intensitas tinggi sering ditujukan kepada mereka yang berpendidikan tinggi, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka kebutuhannya untuk mengakses media sosial akan semakin besar (Bhakti, 2012). Dari pernyataan di atas, populasi yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah mahasiswa. Memahami perbedaan-perbedaan dalam fenomena penggunaan media sosial yang berbeda ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana media sosial sebagai alternatif ruang publik baru dalam upaya meningkatkan partisipasi politik mahasiswa (Hidayah et al., 2020).

Konsep ruang publik terus berubah sesuai dengan kebutuhan yang dilandasi nilai normatif dari diskusi dan debat yang rasional kritis. Konsepsi ini secara historis diturunkan ke generasi berikutnya melalui konteks yang berbeda dengan tujuan yang sama yaitu egalitarianisme atau kesetaraan. Dengan menerapkan norma-norma seperti kritik sosial dan egalitarianisme ke sejumlah aspek hingga mempengaruhi aspek politik, sosial, budaya, ekonomi hingga moralitas (Habermas, 2010). Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengingat studi mengenai media sosial dan ruang publik masih sangat kurang mewakili mahasiswa sebagai pengguna dalam kerangka komunikasi politik melalui lanskap demokrasi yang lebih kontemporer.

Seperti ruang publik tradisional lainnya, media sosial juga digunakan sebagai *platform* untuk mengekspresikan pandangan dan mendiskusikan tema-tema yang relevan yang berhubungan politik dan pemerintahan. Melalui media sosial, pengguna memiliki kesempatan untuk menyajikan opini dan argumen apapun, terkadang terjadi ambiguitas dan

kesalahpahaman yang mengarah pada kebencian, marah dan sebagainya antara pengguna media sosial.

Munculnya berbagai *platform* media sosial seperti *Facebook* dan *WhatsApp* dianggap telah menghidupkan kembali ruang publik baru. Bahkan, media sosial juga telah memberikan akses tanpa batas ruang dan waktu yang telah melampaui kemampuan teknis ruang publik konvensional seperti televisi dan radio. Mengingat hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap kekuatan transformatif media sosial sebagai alternatif ruang publik untuk membantu masyarakat meningkatkan pemahaman yang lebih baik terhadap penggunaan media sosial yang bijak dan bermanfaat sebagai alternatif ruang publik baru (Musa et al., 2020; Susilo et al., 2020).

Hubungan mahasiswa dengan para pembuat kebijakan dirasakan kurang efektif. Dapat dilihat bahwa komunikasi politik yang masih satu arah dapat memberikan kemungkinan bagi para elit politik lebih leluasa melakukan penyimpangan tanpa ada pengawasan yang lebih terbuka daripada masyarakat terutama mahasiswa. Selama ini, arus informasi dan komunikasi politik cenderung mengandalkan media konvensional seperti radio, televisi dan media cetak kurang ada respon langsung dari masyarakat sehingga mahasiswa kurang memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasi politik mereka. Sebab itu, kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana media sosial sebagai ruang publik baru dalam upaya meningkatkan partisipasi politik mahasiswa.

Asumsi dalam teori tindakan komunikatif (*Communicative Action*) adalah menganggap ruang publik memiliki pengaruh secara politis karena memaparkan logika kritis tentang seberapa demokratis komunikasi yang dibangun dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Implikasi dari teori ini diharapkan menjadi bagian dari komunikasi politik yang lebih luas untuk menginformasikan berbagai aspek seperti politik. Dalam politik, kebenaran dan ketulusan adalah norma yang penting. Sebab itu, teori tindakan komunikatif sangat relevan digunakan dalam penelitian komunikasi politik (Habermas, 1991).

Meskipun ruang publik dianggap sebagai ruang inklusif, egalitarian, dan dianggap sebagai fondasi penting dalam demokrasi, namun terdapat adanya segregasi (pemisahan) maupun juga kondisi yang memungkinkan (*condition of possibility*) untuk memunculkan adanya ruang publik dalam masyarakat (Subijanto, 2014). Sebab itu, teori tindakan komunikasi berupaya menghubungkan antara keputusan yuridis (politis) dengan respon sosiologis, yakni upaya menyelidiki anggapan-anggapan normatif dari interaksi sosial mahasiswa mengenai hukum dan kebijakan dengan menekankan dimensi komunikatif dalam perbincangan yang rasional dan kritis untuk mencapai konsensus.

Untuk menghindari hambatan dalam tindakan komunikatif, mahasiswa sebagai peserta dalam ruang publik diharapkan untuk membangun diskursus etika, yaitu suatu justifikasi normatif untuk mencapai kepentingan antara sesama individu dan kelompok. Habermas kemudian merumuskan syarat-syarat komunikatif sebagaimana yang terangkum dalam *the ideal speech situation* (situasi percakapan yang ideal) (Habermas, 1991), yaitu:

1. Semua peserta mempunyai peluang yang sama untuk memulai suatu diskusi dan dalam diskusi itu mempunyai peluang yang sama untuk mengemukakan argumen-argumen dan mengkritik argumen-argumen peserta lain.
2. Diantara peserta-peserta tidak ada perbedaan kekuasaan yang dapat menghindari bahwa argumen-argumen yang mungkin relevan.
3. Semua peserta mengungkapkan pemikirannya dengan ikhlas, sehingga tidak mungkin terjadi yang satu memanipulasi yang lain tanpa disadarinya.

Habermas menawarkan sebuah konsepsi dengan menggunakan “hubungan pragmatis-formal” (*Formal-Pragmatic Relations*) manusia yaitu kenyataan objektif, kenyataan sosial dan kenyataan subjektif yang dapat menghasilkan tiga macam sikap diantaranya mengobjektifkan (*objectivating*), konformatif-norma (*norm-conformative*) atau sikap kritis (*critical*) dan sikap ekspresif. Rasionalitas komunikatif disini dimaksudkan sebagai rasionalitas yang dipahami sebagai diskusi argumentatif untuk memperoleh kesepakatan bersama (Habermas, 1991).

Konsep dasar ruang publik (*Public Sphere*) ini terungkap dari pemikiran Habermas. Dimana ruang publik merupakan bagian terpenting untuk mewujudkan tindakan komunikatif (*communicative action*). Menurut Habermas, demokrasi dapat berjalan dengan baik jika dalam suatu negara terdapat ruang publik yang setara (*egaliter*), dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menyampaikan idenya. Secara defenitif, menurut Habermas ruang publik dapat didefenisikan sebagai ruang yang terletak diantara komunitas ekonomi dan negara tempat publik melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini mereka, serta menjalankan pengawasan terhadap pemerintah (Habermas, 1991).

Ada tiga prinsip utama dalam ruang publik yaitu (1) Akses yang mudah terhadap informasi. Teknologi seperti media sosial yang memungkinkan anggota masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi; (2) Tidak ada hal yang istimewa (*privilege*) terhadap partisipan; dan (3) Partisipan dapat mengemukakan alasan rasional dalam berdiskusi mencari konsensus. Alasan rasional menjadi syarat penting terwujudnya ruang publik yang ideal khususnya bagi mahasiswa (Salman, 2017).

Menurut Habermas, bahwa aktivitas komunikasi di ruang publik harus berorientasi pada klaim yang valid yang secara nyata, tetapi terkait dan saling melengkapi satu sama lain yaitu klaim kebenaran (*truth*), yaitu klaim menyangkut dunia alamiah objektif; klaim ketepatan (*rightness*), yaitu klaim tentang pelaksanaan norma-norma sosial; klaim athenitas atau kejujuran (*sincerety*), yaitu klaim tentang kesesuaian antara batin dan ekspresi; dan klaim komprehensibilitas (*comprehensibility*), yaitu klaim tentang kesepakatan karena terpenuhinya tiga klaim di atas sebagai alasan yang mencukupi untuk konsensus (Habermas, 1991).

Dalam demokrasi deliberatif harusnya terdapat kekuatan tindakan komunikatif pada ruang publik. Proses deliberasi dalam forum terbuka tersebut adalah sebuah proses dimana mahasiswa sebagai warga negara berusaha untuk meyakinkan warga lainnya untuk menerima kebijakan yang diusulkan dengan berlandaskan penggunaan *reason* dihadapan publik (*public use of reason*) dalam proses dialog deliberatif yang *take and give* (Bohman, 1996). Oleh sebab itu, peran ruang publik dalam proses ini menjadi sangat penting.

Media sosial memungkinkan mahasiswa untuk memainkan peran aktif secara sosiologis dan politis. *Social Media allow them to articulate their social networks, and establish or maintain connections with others* (Bhakti, 2015). Media sosial adalah sarana bagi mahasiswa untuk berbagai informasi teks, gambar, video dan audio dengan satu sama lain, merangkum beberapa fungsi dan tujuan media sosial (Kaplan & Haenlein, 2010).

Mengenai komponen terkait media sosial, teori kehadiran sosial atau *social presence theory* bahwa media dibedakan dalam beberapa tingkatan yaitu: akustik, visual, dan fisik (Short et al., 1976). Sehubungan dengan dimensi media sosial, konsep presentasi diri atau *self-presentation* menyatakan bahwa dalam semua jenis interaksi sosial orang memiliki keinginan untuk mengendalikan kesan orang lain terhadap mereka (Goffman, 1959). Biasanya, presentasi seperti itu dilakukan melalui pengungkapan diri yaitu pengungkapan

informasi pribadi atau *self-disclosure* yang disadari atau tidak disadari (mis., pikiran, perasaan, suka, tidak suka) yang konsisten dengan gambar yang ingin diberikan (Kaplan & Haenlein, 2010).

Studi ini melihat salah satu tipologi penggunaan media sosial yaitu sebagai ruang publik dimana media sosial telah menghadirkan sebuah ruang diskusi (Susilo, 2020) yang mudah diakses tanpa batas, bebas dari tekanan sehingga mahasiswa agen perubahan (*agent of change*) dapat melakukan pembicaraan politik guna mewujudkan suatu kesepahaman bersama terkait dengan kepentingan umum yang lebih luas. Di sisi lain, kemunculan berbagai *platform* media sosial seperti *Facebook* dan *WhatsApp* (WA) sebagai ruang publik baru dapat dilihat dari aspek komunikasi politik di kalangan mahasiswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *mixed method*, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pengguna aktif media sosial dengan jumlah sampel sebanyak 84 orang mahasiswa. Penelitian ini menggunakan satu pendekatan kuantitatif *online* survei dan kualitatif melalui wawancara. Adapun *interview* dilakukan untuk meningkatkan pemahaman lebih baik dari penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa sebagai informan sebanyak 8 orang mahasiswa dengan durasi wawancara sekitar 10 menit.

Objek penelitian hanya pada media *WhatsApp* dan *Facebook*. Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya tentang media sosial baru telah diteliti, namun masih terdapat beberapa *gap* dalam memahami bagaimana mahasiswa menggunakan media sosial sebagai ruang publik baru untuk meningkatkan partisipasi politik. Maka, penelitian ini juga diharapkan mampu meneruskan beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai penjelasan melalui hasil kuantitatif yang lebih terperinci (Bonsón et al., 2019; Saidah & Rusfian, 2020; Susilo, Christantyawati, et al., 2019; Susilo, Prabowo, et al., 2019; Taiminen & Karjaluo, 2015).

Penelitian fenomenologi berupaya menggambarkan fenomena kesadaran dan bagaimana fenomena itu tersusun. Dengan adanya kesadaran ini, tidak mengherankan jika pemerhati politik dan mahasiswa juga memiliki kesadaran tertentu terhadap apa yang mereka alami (Creswell, 2007). Studi dengan perspektif fenomenologi dengan demikian berupaya menjelaskan makna pengalaman mahasiswa dalam menggunakan media sosial seperti *WhatsApp* dan *Facebook* dalam memandang dan menilai politik dan perkembangan demokrasi sehingga memudahkan diantaranya dalam berinteraksi dan berkomunikasi antara mahasiswa dalam meningkatkan partisipasi politik mereka. Dengan *mixed method* yaitu kolaborasi antara kuantitatif survei dan *interview*, penulis melakukan *learning by people* yaitu belajar daripada masyarakat dan bukan hanya *study of people* atau mengkaji masyarakat (Spradley, 1980).

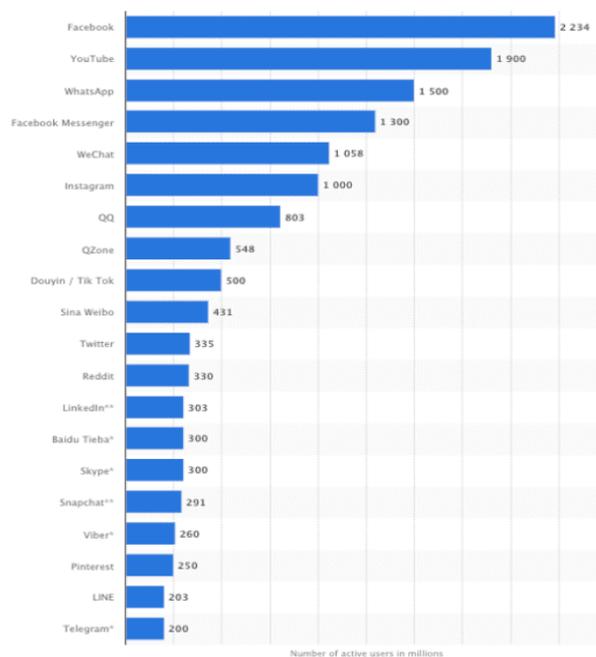
Studi tentang media sosial yang dirancang untuk mahasiswa di media seperti *WhatsApp* dan *Facebook* untuk bagaimana mahasiswa diskusi politik. Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini menggunakan *mixed method* atau metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Pertama, dengan survei *online* dengan menggunakan *google form*. Kedua, melalui *interview* untuk menindak lanjuti eksplorasi lebih lanjut komunitas mahasiswa menggunakan media sosial sebagai ruang publik.

Tujuan dari wawancara adalah bukan hanya mendapatkan jawaban atas pertanyaan, atau untuk menguji hipotesis, dan untuk tidak "mengevaluasi" seperti pada umumnya. Akar dari *interview* adalah untuk memahami pengalaman mahasiswa yang berbeda dari

pertanyaan survei dan makna yang mereka dapatkan dari berbagai pengalaman. Sebanyak 8 mahasiswa sebagai informan yang terbagi menjadi 4 laki-laki dan 4 perempuan dengan pertanyaan yang berbeda menanyakan apakah mereka mau berpartisipasi dalam diskusi politik melalui media sosial. Selain itu, komponen kualitatif digunakan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam tentang bagaimana siswa menggunakan media sosial sebagai ruang publik untuk meningkatkan partisipasi politik.

DISKUSI

Berbagai *platform* media sosial telah digunakan oleh mahasiswa di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa mahasiswa memilih media sosial yang paling populer seperti *Facebook (FB)* dan *WhatsApp* untuk berdiskusi tentang politik. *Facebook* dan *WhatsApp* juga merupakan media sosial dengan pengguna yang terbanyak di dunia. Berikut data statistik dari situs *smartsights.com* (2019) yang menunjukkan jumlah pengguna media sosial di seluruh dunia (Chaffey, 2019).

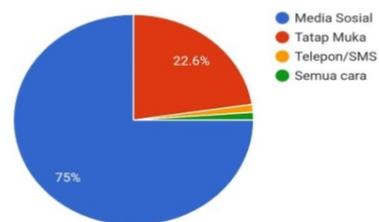


Gambar 1
Jumlah Pengguna Media Sosial Facebook dan WhatsApp Tahun 2019

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa *Facebook* dan *WhatsApp* sebagai media sosial dengan pengguna terbanyak di Dunia pada tahun 2019. Sebab itu, mahasiswa dapat memanfaatkan media sosial seperti *Facebook* dan *WhatsApp* sebagai sarana untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi.

Media apa yang digunakan
untuk berkomunikasi
sebelum aksi unjuk rasa

84 responses



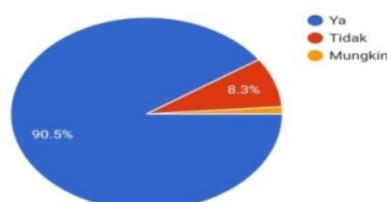
Gambar 2

Media yang Digunakan untuk Melakukan Aksi Unjuk Rasa (Demonstrasi)

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa 75 % mahasiswa menyatakan media sosial sebagai salah satu media yang efektif untuk berkomunikasi sebelum memulai aksi unjuk rasa dalam upaya menyalurkan aspirasi mereka tentang revisi RUU KPK dan RKUHP lainnya. Selanjutnya, media sosial dari perspektif teori *Comunicative Action* dapat disimpulkan sebagai salah satu alternatif komunikasi yang memiliki banyak potensi lain seperti modal sosial (*Social Capital*). Melalui penalaran induktif, penelitian ini telah mengembangkan teori yang berpendapat bahwa individu menggunakan media sosial dapat mengalami perubahan dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi, yaitu perubahan yang menjadikan segalanya menjadi lebih terbuka dan cepat.

Apakah kamu pernah melihat
tulisan ajakan atau gelar aksi
unjuk rasa Tolak RUU di
Media sosial seperti WA dan
Facebook?

84 responses



Gambar 3

Media Sosial Sebagai Tempat untuk Mengajak Gelar Aksi Unjuk Rasa

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat beberapa mahasiswa yang berusaha menggalang opini dan mengajak gelar aksi unjuk rasa tolak RUU melalui media sosial seperti *Facebook* dan *WhatsApp*. Dengan menggunakan media sosial, sebanyak 90.5 % mahasiswa

melihat tulisan dan menerima ajakan untuk berunjuk rasa, walaupun dalam jarak yang sangat jauh sekalipun media sosial terbukti sangat efektif.

Media sosial dan aksi demonstrasi di jalan tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan hasil wawancara didapati fakta bahwa gerakan ini bermula dari status update yang terus mendapat dukungan di *Facebook* dan *WhatsApp*. Gerakan di media sosial itu lantas berbuah aksi turun ke jalan dan mendesak revisi RKHUP. Menurut beberapa mahasiswa, aksi yang mereka lakukan menggunakan media sosial untuk menggalang dukungan, mengorganisasikan isu, dan mengumpulkan massa. Hal ini diungkapkan oleh beberapa mahasiswa bahwa, ajakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa di Gedung DPR berasal dari media sosial.

Penelitian ini berkonsentrasi pada kualitas atau makna penggunaan satu media sosial sebagai ruang publik baru yang menunjukkan bahwa ukuran penggunaan media sosial memiliki satu hubungan erat dengan peningkatan partisipasi politik sehingga dapat membentuk ruang publik yang efektif dalam mewujudkan demokrasi yang liberatif. Dengan kata lain, media sosial seperti *Facebook* dan *WhatsApp* sebagai ruang publik telah terbukti dapat meningkatkan kadar interaksi sosial dengan tetap menjalin, membina dan mengekalkan interaksi sosial di kalangan mahasiswa Indonesia.

Dengan menggunakan media sosial seperti *WhatsApp* atau *Facebook*, secara praktis komunikasi telah berhasil menghubungkan teknologi informasi dan komunikasi dengan kekuatan ruang publik baru. Peneliti menyatakan bahwa penggunaan media sosial telah memberikan banyak pengaruh positif terhadap komunikasi politik dan demokrasi di Indonesia karena dapat menurunkan jumlah rintangan komunikasi dalam ruang dan waktu. Hal demikian akhirnya juga dapat meningkatkan kesadaran politik secara lebih rasional dan kritis. Dengan kata lain, hasil penelitian memaparkan bukti bahwa media sosial baru telah menjadi ruang publik yang efektif bagi mahasiswa di Indonesia.

KESIMPULAN

Media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik mahasiswa. Media sosial memiliki peran penting sebagai alternatif ruang publik baru dalam memberikan kontribusi kepada mahasiswa untuk mewujudkan demokrasi yang lebih substansif. Media sosial seperti *WhatsApp* dan *Facebook* semakin memberikan peluang keikutsertaan dan kesamaan pemahaman politik mahasiswa di Indonesia terhadap nilai nilai demokrasi untuk menanggapi berbagai isu dan tema yang relevan. Selain itu, mahasiswa dapat memainkan peran penting dalam proses berdemokrasi dengan terbentuknya ruang publik baru yang universal, dapat diakses oleh mahasiswa di seluruh daerah di Indonesia tanpa mengalami hambatan. Meskipun tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah studi perwakilan dari populasi yang menyeluruh dan terperinci, hasil penelitian telah menyajikan fakta bahwa media sosial telah menjadi alternatif ruang publik baru dimana mahasiswa juga dapat membangun komunikasi dan berdiskusi tentang tema dan isu strategis, salah satunya tentang politik. Selain itu, media sosial sebagai ruang publik telah mengubah pola komunikasi menjadi lebih dialogis dan kritis. Melalui media sosial seperti *WhatsApp* dan *Facebook*, mahasiswa dapat memainkan peran penting dalam proses demokrasi dengan terbentuknya ruang publik baru yang universal, dapat diakses oleh mahasiswa di seluruh daerah di Indonesia tanpa mengalami hambatan. Dengan harapan, semakin terbukanya ruang publik bagi mahasiswa melalui media sosial, maka semakin meningkatkan juga partisipasi politik mahasiswa di Indonesia secara lebih terbuka, rasional dan kritis dalam kerangka komunikasi politik yang dialogis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhakti, S. E. (2012). *Student on facebook through uses and gratifications perspectives*.
- Bhakti, S. E. (2015). *The Uses and Effects of Online Social Media among Acehnese Students*.
- Bohman, J. (1996). *Public deliberation*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Bonsón, E., Perea, D., & Bednárová, M. (2019). Twitter as a tool for citizen engagement: An empirical study of the Andalusian municipalities. *Government Information Quarterly*. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.03.001>
- Chaffey, D. (2019). *Global Social Media Research Summary 2019*.
- Chaffey, D. (2020). *Global social media research summary 2020*.
- Creswell, J. (2007). Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (2nd Edition). Thousand Oaks: Sage. *Qualitative Inquiry*.
- Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*, New York, NY: Doubleday Anchor Books.
- Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT press.
- Habermas, J. (2010). *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis* terj. Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayah, Y., Sapriya, S., Darmawan, C., & Malihah, E. (2020). Protes Sosial Dalam Komunikasi Politik di Era Digital Melalui Civic Community Pada mahasiswa. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 4(1), 220. <https://doi.org/10.25139/jsk.v4i1.1964>
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Musa, H. G., Mulyana, D., Bajari, A., & Navarro, C. J. S. (2020). Promoting Indonesian tourism through Sudanese tourists communication experiences in Bandung. *Jurnal Studi Komunikasi*, 4(1). <https://doi.org/10.25139/jsk.v4i1.2150>
- Putranto, T. D. (2019). Wacana Berita PT. Djarum dan Bulu Tangkis Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi*, 3(1). <https://doi.org/10.25139/jsk.v3i1.1052>
- Saidah, M., & Rusfian, E. Z. (2020). Hoax management of presidential staff office: An example of government public relations strategies. *Jurnal Studi Komunikasi*, 4(1), 32. <https://doi.org/10.25139/jsk.v4i1.1769>
- Salman. (2017). Media Sosial Sebagai Ruang Publik. *Kalbisocio*, Volume 4 N(Agustus 2017).
- Short, J., Williams, E., & Christie, B. (1976). *The social psychology of telecommunications*. John Wiley & Sons.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*/James P. Spradley. Published: New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Subijanto, R. (2014). *Ruang Publik Dulu dan Sekarang*.
- Susilo, D. (2020). Penitipan Handphone Sebagai Komunikasi Non Verbal Santri PPP Walisongo Desa Cukir Jombang. *Communication*, 11(1), 94–111.
- Susilo, D., Christantyawati, N., Joko Prasetyo, I., & Rodrick Juraman, S. (2019). Content analysis of LINE application user: Intersecting technology and social needed. *Journal of Physics: Conference Series*. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1175/1/012224>
- Susilo, D., Prabowo, T. L., & Putranto, T. D. (2019). Communicating secure based feeling: Content analysis on indonesian police official account. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*. <https://doi.org/10.35940/ijeat.F8377.088619>

- Susilo, D., Putranto, T. D., Neu, M. T. L. M., & Navarro, C. J. S. (2020). NAGEKEO WOMEN'S CULTURAL STRUGGLE AS A FLORES SUB-CULTURE AGAINST THE FLOW OF CIVILIZATION'S PROGRESS. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(01), 001. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v6i01.2064>
- Taiminen, H. M., & Karjaluoto, H. (2015). The usage of digital marketing channels in SMEs. *Journal of Small Business and Enterprise Development*. <https://doi.org/10.1108/JSBED-05-2013-0073>